

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Konflik bisa menjadi hal yang membangun, namun juga bisa menjadi hal yang merusak. Walaupun konflik bisa menjadi hal yang merusak, pada dasarnya aktor-aktor yang berkonflik merasa perlu untuk melakukan negosiasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi (Wallensteen 2004). Menurut UCDP (*Uppsala Conflict Data Program*) ada empat jenis konflik, yaitu *intra-state conflict*, *inter-state conflict*, *non-state conflict*, dan *extra-systemic conflict*. Konflik *intra-state* merupakan konflik antara aktor pemerintah dan aktor non pemerintah yang tidak ada campur tangan oleh negara lain. Konflik *inter-state* merupakan konflik yang terjadi antara dua atau lebih pemerintah negara. Konflik *non-state* merupakan konflik dimana penggunaan angkatan bersenjata di antara dua kelompok bersenjata yang terorganisasi baik pemerintahan maupun non pemerintah yang menimbulkan setidaknya 25 konflik dalam satu tahun. Konflik *extra-systemic* merupakan konflik diantara pemerintah suatu negara dengan non pemerintah negara tersebut di luar teritori negaranya sendiri.

Menurut SIPRI (2015), pada tahun 2014 terjadi lebih banyak konflik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2000. Menurut data yang diperoleh dari SIPRI (2015), konflik masih terus meningkat terutama di Timur Tengah dan Afrika sejak tahun 2010. Meskipun, pada 2013 juga terjadi beberapa konflik, namun konflik tersebut meningkat di tahun 2014 seperti yang terjadi di

Krimea, Ukraina. *Global Peace Index* (GPI) juga menyebutkan bahwa wilayah Afrika termasuk wilayah yang tidak aman dengan skor diatas 3, seperti misalnya wilayah Somalia (3.368) dan Sudan Selatan (3.397).

Sudan merupakan salah satu negara yang dijajah Inggris dan Sudan merdeka dari Inggris pada tahun 1956. Bentuk negara Sudan adalah negara federal dengan sistem pemerintahannya presidensiil. Pada tahun 2014, GDP per kapita Sudan hanya sebesar US\$ 1.875,8 (World Bank 2014). Sebanyak 40% dari total populasi Sudan dan 50% total populasi wanita di Sudan tidak berpendidikan dan tidak lebih dari 20% masyarakatnya mempunyai akses listrik (Hauss 2010). Sudan terdiri dari berbagai macam etnis, salah satu etnis terbesar adalah etnis Arab yang kebanyakan berasal dari Timur Tengah dan Afrika yang mayoritas beragama Kristen. Etnis Afrika merupakan etnis mayoritas di Sudan sedangkan etnis Arab mempunyai jumlah yang lebih sedikit. Namun, etnis Arab mendominasi dalam pemerintahan Sudan sejak kemerdekaannya, sehingga kebijakan – kebijakan yang dibuat cenderung berpihak pada etnis Arab, seperti adanya pembagian wilayah antara etnis Arab dan Afrika. Etnis Arab mendapatkan wilayah yang subur di bagian Utara termasuk ibukota negara Sudan, Khartoum, sedangkan etnis Afrika berada di daerah yang kering di Selatan. Atas perlakuan tidak adil inilah kemudian warga Afrika melakukan protes dengan membentuk *Darfur Liberation Army* yang kemudian berganti nama menjadi *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM).

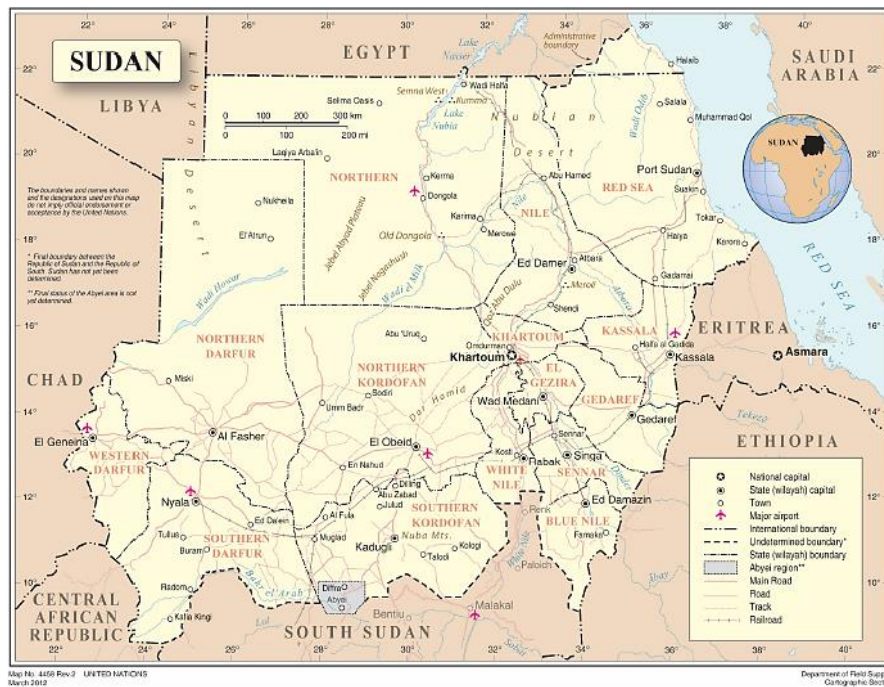
Pada tahun 2003, SPLM/A dan JEM menyerang pangkalan udara pemerintah Sudan yang terletak di El Fasher menggunakan *antonov bomber* dan *helicopter*

gunship (Eyes On Darfur). Selain menyerang pangkalan udara, SPLM/A dan JEM juga mengambil amunisi dan *heavy weapons* yang ada di pangkalan udara tersebut. SPLM/A dan JEM menuntut pemerintah Sudan untuk mengakui mereka sebagai gerakan politik, adanya kekuasaan otonomi dalam sistem federal di Sudan dan pembangunan di Darfur yang masih tertinggal.

Adanya pembentukan pasukan ini dan penyerangan pangkalan udara dibalas dengan pembentukan pasukan Janjaweed yang terdiri atas suku nomaden Arab Rizeigat dan Misseriya yang dijanjikan akan diberi tanah oleh pemerintah Sudan. Janjaweed ini dibentuk untuk meredakan konflik yang terjadi, namun faktanya Janjaweed tidak hanya memburu SPLM/A dan JEM, tetapi juga membantai warga sipil. Bahkan, Janjaweed diduga melakukan pembersihan etnis di wilayah Darfur dengan korban sekitar 70.000 orang (Cobham, 2005). Selain dari suku Arab Rizeigat dan Misseriya, suku Abbala yang tidak mempunyai tanah juga ikut masuk ke Janjaweed karena menginginkan tanah dari pemerintah Sudan.

Upaya mempertemukan aktor konflik telah dilakukan oleh Presiden Chad, Idriss Déby pada tahun 2003. Idriss Déby menjadi mediator antara pemerintah Sudan dan SPLM/A dalam perundingan gencatan senjata. Mereka menyetujui adanya gencatan senjata selama 45 hari. Namun gencatan senjata ini gagal dilakukan sehingga pihak SPLM/A meminta bantuan organisasi internasional. Mediasi kembali dilakukan dengan bantuan Uni Afrika pada tahun 2004. Mediasi ini kembali mempertemukan pemerintah Sudan dan SPLM/A untuk membicarakan gencatan senjata dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Darfur.

Gambar 1.1 Peta Negara Sudan



Sumber : International Crisis Group

Pemerintah Sudan sudah mengupayakan perjanjian damai dengan kelompok pemberontak di Darfur dengan mengadakan perjanjian damai *Darfur Peace Agreement* pada Mei 2006, namun perjanjian itu hanya ditandatangani oleh SPLM/A yang dipimpin Minni Minnawi atau SPLM/A MM, sedangkan SPLM/A yang dipimpin oleh Abdul Wahid atau SPLM/A AW tidak mau menandatangani perjanjian damai tersebut. Alasan Abdul Wahid tidak mau menandatangani perjanjian itu adalah karena pembagian kekuasaan dan kompensasi yang dijanjikan tidak sesuai dengan permintaan SPLM/A. Abdul Wahid juga meminta pemerintah Sudan menjamin pelucutan senjata dari tentara Janjaweed (Eyes On Darfur).

Gambar 1.2 Peta Negara Sudan Selatan



Sumber : International Crisis Group

Pada tahun 2011, Sudan terbagi menjadi dua yaitu Republik Sudan dan Republik Sudan Selatan lewat referendum di Sudan bagian selatan dengan hasil vote condong ke pemisahan Sudan. Akan tetapi, pemisahan ini tidak menghentikan konflik yang terjadi di Sudan dan Sudan Selatan. Pada April 2012, konflik antara Sudan dan Sudan Selatan mengarah kepada perang antara kedua negara (Ottaway dan El-Sadany, 2012). *Sudan People's Liberation Army (SPLA)* menyeberang ke Sudan sedangkan militer Sudan mengebom desa – desa yang ada di perbatasan Sudan dan Sudan Selatan (Ottaway dan El-Sadany, 2012).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang muncul adalah:

Mengapa masih terjadi konflik antara Sudan dan Sudan Selatan setelah adanya referendum pemisahan diri Sudan Selatan dari Sudan?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui alasan dan bagaimana konflik masih tetap terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan periode tahun 2011.
- b. Mengetahui cara penyelesaian konflik antara Sudan dan Sudan Selatan yang paling efisien.

1.3.2. Akademis

Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan strata satu (S1) dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Selain itu, penulisan penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya karya ilmiah mahasiswa Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Tujuan akademis lain dari penulisan penelitian ini adalah untuk memperkaya wawasan mahasiswa mengenai konflik dan resolusi konflik secara umum, serta konflik dan resolusi konflik di Sudan dan Sudan Selatan secara khusus.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk :

- a. Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai konflik antara Sudan dan Sudan Selatan tahun 2011 – 2015.
- b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai penyebab masih terjadinya konflik antara Sudan dan Sudan Selatan setelah terjadinya referendum pemisahan diri Sudan Selatan dari Sudan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada Sudan dan Sudan Selatan khususnya, PBB dan Uni Afrika pada umumnya agar resolusi konflik yang dilakukan dapat efektif menghentikan konflik yang terjadi sehingga tidak lagi terjadi konflik setelah adanya kesepakatan bersama.

1.4.2. Akademis

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memberi kontribusi kepada studi ilmu hubungan internasional terutama konflik dan resolusi konflik, khususnya di Sudan dan Sudan Selatan.

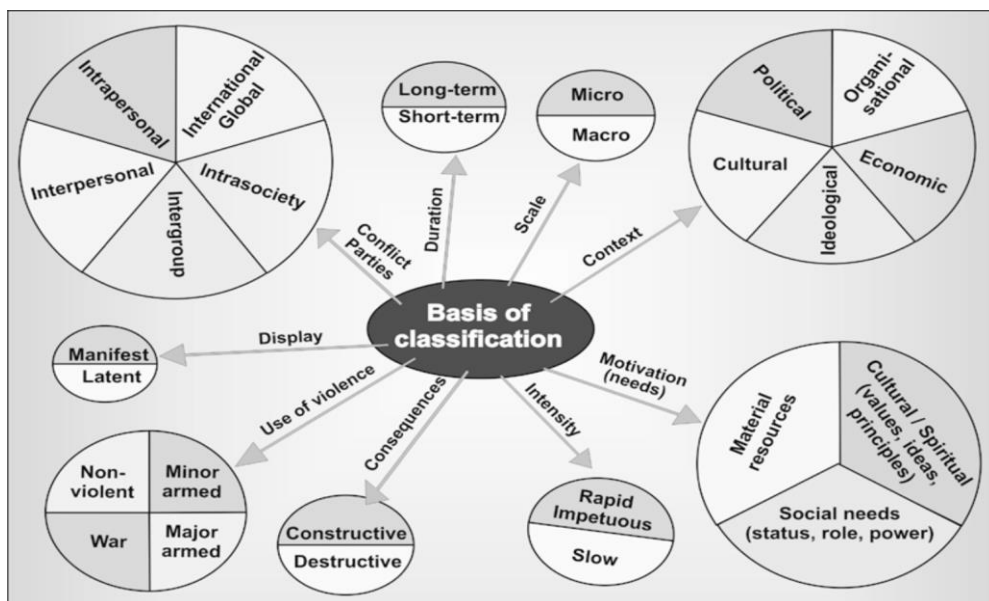
1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. *The Conflict Triangle* – Johan Galtung

Konflik adalah kondisi adanya pertentangan atau ketidakcocokan antara beberapa pihak (individu, kelompok, atau organisasi) (Glasl 2002) dimana para pihak tersebut berusaha untuk saling menggagalkan tercapainya tujuan dari pihak lain (Folger, Poolle dan Stutman 1993). Tujuan tersebut bisa berupa status, kekuasaan, ataupun sumber daya yang bersifat langka (Cosser 1956).

Konflik secara umum dipandang sebagai fenomena biasa yang pasti terjadi dalam masyarakat, keadaan yang abnormal dalam kehidupan sosial, atau kondisi yang penting untuk membangun masyarakat (Lyamouri-Bajja, et al. 2012). Dalam konteks ini, konflik dapat menyebabkan hasil yang negatif maupun positif tergantung dari proses penanganan konflik diantara para pihak. Apabila para pihak setuju untuk menyelesaikan konflik secara damai, maka mereka bisa mendapatkan hasil yang positif dari konflik tersebut misalnya perjanjian kerjasama baru tanpa mengeluarkan banyak biaya. Namun jika para pihak lebih memilih menggunakan jalur kekerasan, maka para pihak tersebut akan mendapatkan hasil yang negatif seperti terjadinya perang yang dapat merugikan banyak pihak. Perlu diketahui disini bahwa perang bukanlah konflik, melainkan hasil negatif dari penanganan konflik yang buruk (Lyamouri-Bajja, et al. 2012). Berikut ini adalah beberapa tipe konflik.

Gambar 1.3 Tipe - tipe Konflik



Sumber : Lyamouri-Bajja, et.al "Youth transforming conflict" hlm. 57

Secara hukum humaniter, ada dua tipe konflik yaitu konflik internasional dan konflik non internasional. Konflik internasional terjadi antara negara – negara baik secara langsung maupun sebuah negara mengintervensi konflik internal negara lain (Vite 2009). Bentuk intervensi tersebut dapat berupa pengiriman pasukan tentara untuk membantu salah satu pihak yang sedang berkonflik. Bantuan ini dapat berupa bantuan dana, bantuan peralatan militer, pelatihan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan perencanaan kegiatan militer. Konflik non internasional terjadi di dalam teritori suatu negara, dimana salah satu pihak yang berkonflik adalah non pemerintah. Ketegangan internal seperti tindak protes, tindakan kekerasan yang menyebar tidak bisa dikatakan sebagai konflik non internasional. Ada dua kriteria atau konsep untuk mengukur suatu konflik di dalam negara sehingga dapat dikatakan konflik non internasional, yaitu intensitas kekerasan dan pengorganisasian para pihak. Dua kriteria ini membutuhkan data – data seperti lamanya konflik, frekuensi terjadinya kekerasan & operasi militer, jenis senjata yang digunakan, pemindahan warga sipil, kontrol teritori oleh pihak oposisi, dan jumlah korban (terluka, meninggal dan pengungsi) (Vite 2009).

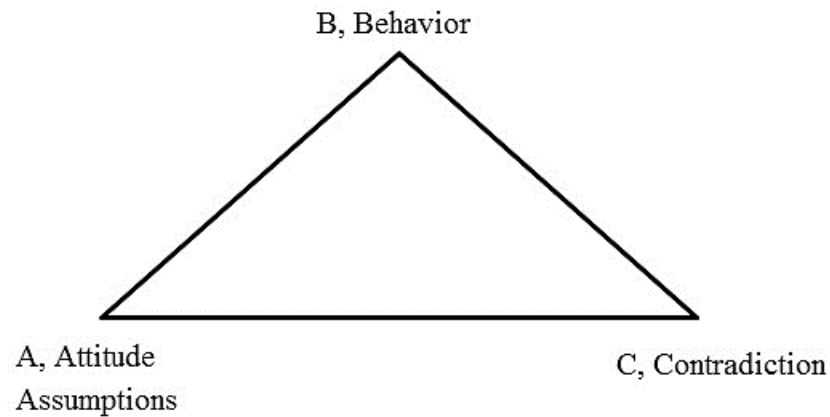
Galtung sendiri melihat konflik sebagai proses dinamis dimana struktur, perilaku dan sikap dari para pihak selalu berubah dan mempengaruhi pihak yang lain (Mial, Ramsbotham dan Woodhouse 1999). Dapat digambarkan apabila pihak A berusaha menyerang pihak B, maka pihak B tentu akan berusaha menyerang balik pihak A. Menurut Galtung, dalam setiap konflik, selalu ada pertentangan diantara para pihak (Galtung 1996). Pertentangan

tersebut dapat berupa perbedaan nilai, tujuan, ataupun perebutan sumber daya yang terbatas.

Johan Galtung menyebutkan konflik terdiri atas tiga faktor, yaitu *attitudes/assumptions*, *behavior*, dan *contradiction/content*. *Attitudes/assumptions* merupakan hal yang tersembunyi dari konflik. Maksudnya adalah apa yang aktor persepsikan dari terjadinya konflik. Persepsi ini bisa mengarah kepada salah persepsi dari aktor yang berkonflik. *Behavior* mengarah kepada aksi – aksi yang dilakukan para aktor konflik, seperti penggunaan kekerasan, penggunaan ancaman, dan proses mediasi. *Behavior* ini terbagi menjadi dua, yaitu *destructive behavior* dan *constructive behavior*. *Destructive behavior* dapat berupa penggunaan kekerasan kepada aktor lain yang bersifat menyakiti atau merugikan, sedangkan *constructive behavior* berupa mediasi antar aktor yang bersifat membangun. Kedua *behaviors* ini dapat dilakukan oleh aktor yang sama pada waktu yang sama (Galtung, Peace by Peaceful Means 1996). *Contradiction* merupakan tujuan para aktor berkonflik atau apa yang diinginkan aktor setelah mereka berkonflik. Namun, *contradiction* juga bisa berupa rasa frustrasi dimana apa yang aktor inginkan tidak dapat diperoleh.

Untuk lebih jelasnya, Galtung membuat gambar segitiga konflik seperti dibawah ini

Gambar 1.4 Segitiga Konflik Galtung



(Sumber: Galtung, 1996 hlm. 72)

Konflik bisa terjadi dari sudut mana saja (A/B/C). Konflik bisa muncul dari sudut C, dimana *contradiction* berupa frustrasi dirasakan oleh aktor yang menyebabkan aktor merasa harus berbuat sesuatu dan pada akhirnya aktor akan berbuat agresif untuk mendapatkan apa yang diinginkannya ($C \rightarrow A \rightarrow B$). Konflik bisa juga dimulai dari sudut A atau sudut B. Aktor dapat berasumsi negatif kepada aktor lain sehingga aktor pertama merasa mempunyai tujuan tertentu yang ingin didapatkannya dengan jalan kekerasan maupun non kekerasan ($A \rightarrow C \rightarrow B$). Kemungkinan yang lain adalah salah satu aktor mempunyai *negative behavior* yang membuat aktor lain berasumsi bahwa aktor pertama akan melakukan hal yang buruk kepadanya, aktor kedua kemudian berusaha mengamankan dirinya dan sumber daya yang dia miliki agar tidak diambil oleh aktor pertama ($B \rightarrow A \rightarrow C$).

Salah satu jalan untuk menyelesaikan konflik adalah dengan mengadakan referendum pemisahan. Referendum pemisahan dapat dilakukan ketika kedua belah pihak setuju untuk mengadakan referendum guna mengakhiri konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan jalur diplomasi atau

perundingan damai dengan pertimbangan tertentu. Dalam konteks ini, referendum pemisahan adalah akibat dari konflik yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi untuk memutuskan apakah suatu wilayah akan tetap masuk dalam teritori negara tertentu atau merdeka menjadi negara sendiri.

Adapun pengertian referendum menurut KBBI adalah

“penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen) atau dapat berarti penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat)” (KBBI).

1.5.2. Conflict Dynamics – Peter Wallensteen

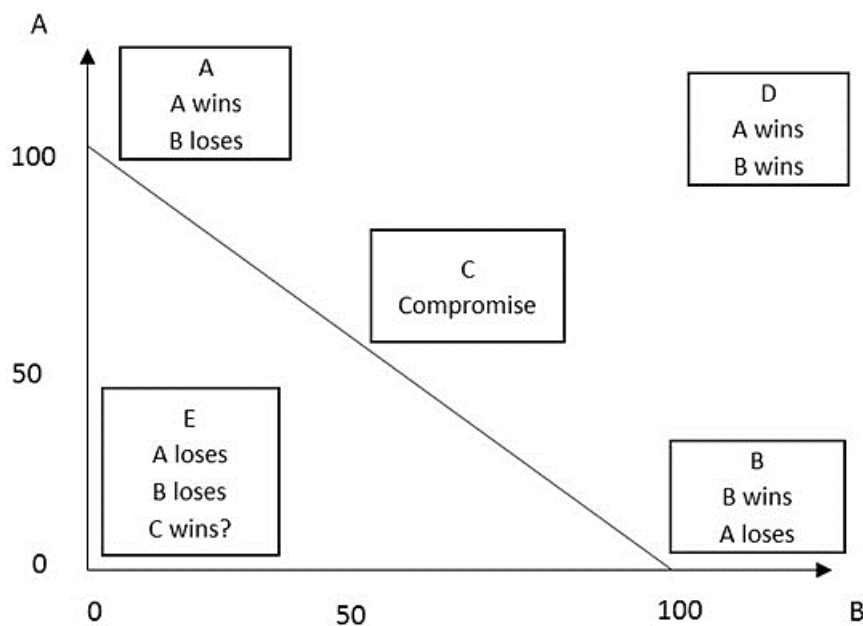
Menurut Wallensteen (2004) konflik terdiri dari tiga komponen, yaitu aksi, ketidakcocokan dan aktor – aktor. Dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut, dapat dikatakan bahwa konflik adalah kondisi sosial dimana aktor – aktor saling berusaha mendapatkan sumber daya yang langka pada waktu yang sama. Sumber daya disini bukan hanya sumber daya yang bersifat ekonomis, namun juga sumber daya yang bersifat tidak ekonomis seperti politik dan kekuasaan. Selain itu, sumber daya juga bisa berupa hal yang tidak dapat dihitung, misalnya keinginan untuk diakui dan diterima oleh masyarakat.

Pada pendekatan ini, konflik dilihat dari dua aktor yang saling bereaksi satu sama lain. Ibaratkan aktor yang berkonflik adalah aktor A dan aktor B. Saat aktor A menyerang gudang senjata aktor B dan mencurinya untuk digunakan dalam konflik, maka aktor B akan bereaksi dengan menghancurkan barak militer aktor A. Saat aktor A mengetahui barak militernya dihancurkan oleh aktor B maka aktor A akan menyerang aktor B lagi dan seterusnya.

Pendekatan ini menekankan bahwa satu peristiwa akan menimbulkan peristiwa yang lain sehingga akan sulit untuk diidentifikasi mana pihak yang lebih bertanggung jawab (Wallensteen 2004). Dinamika konflik melihat bahwa aktor – aktor yang terlibat tidak mempunyai pilihan lain selain terus membalas apa yang terjadi padanya. Sehingga kekerasan akan terus terjadi jika tidak dilakukan resolusi konflik atau perjanjian damai antara aktor yang berkonflik.

Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh teori dari Galtung tentang konflik. Wallensteen membuat bagan mengenai ketidakmampuan sebagai pusat dari dinamika konflik. Bagan ini menunjukkan kemungkinan hasil yang diperoleh oleh para aktor konflik.

Gambar 1.5



Sumber: Peter Wallensteen "Understanding Conflict Resolution" hlm. 37

Pada gambar diatas, tampak ada dua aktor yang berkonflik yaitu aktor A dan B yang berkonflik untuk memperebutkan suatu tujuan. Tujuan itu mungkin

wilayah, sumber daya ataupun kekuasaan. Jika salah satu aktor mendapatkan semua tujuan yang diinginkannya sedangkan aktor yang lain mengalami kekalahan total, baik itu aktor A ataupun aktor B maka kondisi A atau B terjadi. Terkadang kondisi C juga terjadi dimana aktor A dan B membagi rata tujuan yang ingin didapatkannya. Namun, kondisi E juga dapat terjadi jika aktor A dan B sepakat untuk tidak mengambil apapun yang menjadi tujuannya berkonflik, namun menyerahkannya kepada pihak C. Pihak C juga dapat masuk ke dalam konflik antara aktor A dan aktor B dan mengambil tujuan yang hendak di dapatkan oleh aktor A dan aktor B. Kondisi D adalah kondisi yang diinginkan di setiap konflik, dimana aktor – aktor dalam konflik mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Kondisi D ini dinamakan “*transcendence*”¹ yang merupakan ide Johan Galtung. Dalam mencapai kondisi D ini diperlukan kreatifitas dari aktor – aktor yang berkonflik. Terkadang karena konflik, tujuan yang hendak dicapai para aktor menjadi berubah sehingga apa yang dilakukan oleh aktor hanya bersifat imajinatif.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Konflik

Konflik adalah kondisi adanya pertentangan atau ketidakcocokan antara beberapa pihak (individu, kelompok, atau organisasi) (Glasl 2002) dimana para pihak tersebut berusaha untuk saling menggagalkan

¹ *Transcendence* merupakan kondisi dimana ketidakmampuan para aktor diselesaikan dengan menanyakan para aktor apa yang mereka mau atau apa tujuan mereka berkonflik sehingga pada akhirnya para aktor mendapatkan apa yang diinginkannya. Konsep ini dipakai oleh Mahatma Gandhi saat terlibat dalam konflik secara langsung maupun saat menjadi aktor dalam konflik struktural.

tercapainya tujuan dari pihak lain (Folger, Poolle dan Stutman 1993). Tujuan tersebut bisa berupa status, kekuasaan, ataupun sumber daya yang bersifat langka (Coser 1956). Perlu digaris bawahi sumber daya disini bukan hanya sumber daya alam atau sumber daya ekonomi, namun dapat berupa sumber daya yang sifatnya tidak bisa dihitung, misalnya sumber daya politik.

1.6.1.2. Referendum Pemisahan

Referendum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti

“penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen) atau dapat berarti penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat)” (KBBI).

Lebih singkatnya, referendum adalah pemungutan suara oleh seluruh rakyat mengenai satu masalah tertentu (Australia Plus 2014). Jadi, referendum pemisahan adalah penyerahan masalah pemisahan diri kepada semua masyarakat agar masyarakat sendiri yang menentukan apakah daerah tertentu akan memisahkan diri dari negara. Biasanya, referendum hanya memerlukan jawaban “ya” atau “tidak”.

1.6.2. Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1. Konflik

Dari definisi konseptual yang sudah penulis jabarkan diatas, dapat ditarik operasionalisasi konsep dari konflik adalah sebagai berikut.

- Adanya pertentangan atau ketidakcocokan antara beberapa pihak baik individu, kelompok, maupun organisasi.
- Para pihak yang terlibat berusaha saling menggagalkan tercapainya tujuan dari pihak lain.
- Tujuan yang berusaha dicapai para pihak bisa berupa status, kekuasaan, ataupun sumber daya yang bersifat langka.

1.6.2.2. Referendum Pemisahan

Dari definisi konseptual referendum pemisahan yang sudah penulis jabarkan diatas, maka dapat ditarik operasionalisasi konsep dari referendum pemisahan adalah sebagai berikut.

- Suatu masalah diserahkan kepada orang banyak supaya mereka yang menentukan penyelesaiannya.
- Masalah yang ada diselesaikan dengan pemungutan suara umum.
- Masalah pemisahan diri diserahkan kepada semua masyarakat agar masyarakat sendiri yang menentukan apakah daerah tertentu akan memisahkan diri dari negara atau tetap menjadi bagian dari teritori suatu negara.
- Ada proses registrasi pemilih oleh *Southern Sudan Referendum Commission (SSRC)* dan *Southern Sudan Referendum Bureau (SSRB)*

- Syarat – syarat *voter* antara lain merupakan etnis Sudan bagian Selatan atau penduduk Sudan Selatan jangka panjang dibuktikan dengan dokumen identifikasi resmi.

1.6.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis pakai adalah kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Moleong, 2007), dikatakan bahwa

“penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Penelitian kualitatif pada dasarnya bertujuan untuk memahami (*understand*), bukan untuk menjelaskan (*explain*) sehingga dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, penulis ingin memahami mengapa Sudan dan Sudan Selatan masih saja berkonflik setelah adanya referendum pemisahan diri Sudan Selatan dari Sudan tahun 2011.

1.6.4. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian digunakan untuk membatasi penelitian. Penulis akan membatasi penelitian hanya konflik di Sudan yang kemudian memicu terjadinya referendum pemisahan Sudan Selatan dari Sudan pada tahun 2011. Referendum pemisahan diri Sudan Selatan tidak menjadi akhir konflik yang terjadi, namun menjadi awal dari konflik baru antara dua negara. Oleh karena itu, penulis juga akan membahas konflik antara Sudan dan Sudan Selatan yang terjadi dari tahun 2011 – 2015. Penulis memilih periode tahun tersebut karena

pada tahun 2011, Sudan Selatan berhasil memisahkan diri dari Sudan. Konflik yang dibatasi penulis hanya konflik yang terjadi di Sudan dan Sudan Selatan.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

1.6.5.1. Wawancara

Salah satu cara memperoleh data primer adalah dengan melakukan wawancara. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2011). Penulis akan melakukan wawancara dengan Jehanne Henry selaku *senior researcher* di *Human Right Watch* divisi Afrika. Jehanne Henry banyak memberikan kontribusi pada isu – isu di Sudan, Sudan Selatan, Chad dan Kenya. Sejak tahun 2008, Jehanne Henry bekerja di *Human Right Watch* dengan fokus pada konflik di Darfur dan juga isu – isu di Sudan dan Sudan Selatan (Human Right Watch).

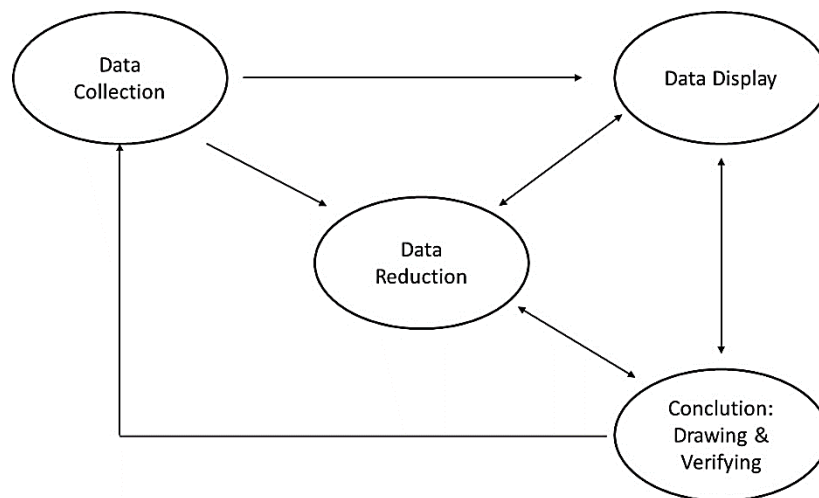
1.6.5.2. Studi Pustaka

Penulis akan menggunakan studi pustaka sebagai sumber sekunder data penelitian. Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2011). Sumber ini bisa berasal dari dokumen – dokumen yang relevan dengan topik yang penulis ambil. Penulis akan mengumpulkan data – data yang relevan dengan topik yang penulis ambil. Data – data itu bisa berasal dari NGO, GO, media cetak maupun organisasi regional yang berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan, regulasi, dan berita – berita tentang topik yang penulis ambil.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan adalah model Miles dan Huberman atau yang biasa disebut model interaktif. Teknik analisis model Miles dan Huberman ini mempunyai aktivitas – aktivitas seperti dibawah ini.

Gambar 1.6 Komponen - komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Faisal dalam Bungin, 2003 hlm. 69

1.6.6.1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data – data yang telah diperoleh akan dipilah kembali oleh penulis. Pada penelitian kualitatif, reduksi data sama maknanya dengan istilah pengelolaan data (Faisal 2003). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada penulis dan juga memudahkan penulis untuk mencari data selanjutnya (Sugiyono 2011).

1.6.6.2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka perlu dilakukan penyajian data agar memudahkan pembuatan kesimpulan (Faisal 2003). Data yang disajikan dapat berupa sketsa, sinopsis, matriks (Faisal 2003), uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, maupun *flowchart* (Sugiyono 2011). Pada

penelitian kualitatif, penyajian data biasanya berupa teks naratif yang dapat digunakan peneliti untuk merencanakan langkah kerja selanjutnya.

1.6.6.3. *Conclusion: Drawing and Verifying* (Pemaparan Kesimpulan dan Verifikasi)

Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan penulis. Kesimpulan didapat penulis setelah mereduksi data dan menyajikan data. Kesimpulan yang didapat merupakan temuan baru yang dapat berupa deskripsi maupun gambaran objek yang diteliti (Sugiyono 2011).

1.6.7. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, definisi konseptual, operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan

Bab II berisi deskripsi konflik di Sudan sebelum dan sesudah referendum pemisahan diri Sudan Selatan

Bab III berisi analisis penyebab masih terjadinya konflik antara Sudan dan Sudan Selatan pasca referendum pemisahan diri Sudan Selatan dari Sudan

Bab IV berisi kesimpulan dan saran